



Mendagri Minta Ahok Realistis

Anggaran Gaji PNS Dipotong Rp 500 M

PEMBELAAN dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, atas sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kesal atas pemangkasan Rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) 2015. Menurut Tjahjo, tidak semestinya gubernur melakukan manuver dengan mengeluarkan opini-opini.

"Saya berharap Gubernur DKI realistis dengan anggaran tersebut, jangan malah membuat manuver dan melemparkan opini-opini ke publik," ujar Tjahjo, usai membuka acara Musrenbang tingkat Provinsi DKI Jakarta ■

Tjahjo juga mengatakan, tim Kemendagri yang dipimpin Dirjen Keuangan Daerah Reydonmyzar Moenek telah bekerja profesional. Menurut dia, tak ada salah penafsiran seperti yang disebut Ahok terkait pemangkasan anggaran DKI 2015. "Yang dimaksud Gubernur DKI kalau Kemendagri salah tafsir terhadap undang-undang tidaklah benar," katanya juga.

Mendagri juga berharap, ke depan ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan DPRD DKI dalam menyusun perencanaan pembangunan yang mengarah pada penyusunan anggaran bersama.

"Tentunya DKI sebagai daerah otonomi yang punya kewenangan, punya pembiayaan sendiri. Tinggal nanti bagaimana kesepakatan

dengan DPRD, kalau memang nanti ada perubahan silakan. Kemudian fungsi pengawasan harus jalan. Saya kira ingin kita tekankan dari Musrenbang," ungkap menteri yang juga kader PDIP tersebut.

Musrenbang yang dilaksanakan Pemprov DKI, lanjutnya, adalah untuk merencanakan mekanisme penyusunan perencanaan anggaran pada tahun anggaran 2016. Semua disusun berdasarkan hasil evaluasi dari anggaran tahun 2014 dan 2015.

Mendagri sendiri tidak mau perseteruan antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI dalam penyusunan anggaran 2015 terjadi lagi. Sehingga selain mengakibatkan hubungan politik antara legislatif dan eksekutif renggang, juga mengakibatkan pembangunan DKI berjalan terlambat.

"Secara prinsip, walaupun terlambat, tapi

pembangunan di Jakarta tetap berjalan. Harus ingat, DPRD dengan Pemprov DKI itu harus bersinergi. Jangan sampai merugikan pengambilan politik di DKI yang menyangkut penyusunan APBD. Perda APBD ini harus sinkron," tegasnya.

Lebih lanjut, Tjahjo juga menginginkan forum musrenbang ini dipersiapkan dengan detail. Sehingga saat dibahas dalam musrenbang tingkat nasional, maka pembangunan di Kota Jakarta dapat ditingkatkan lagi.

Fokus utama yang harus dibahas secara detail adalah masalah klasik Jakarta yaitu banjir, kemacetan dan pembangunan infrastruktur untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut. "Ada percepatan yang harus dipersiapkan, ada proses yang sudah disiapkan sejak awal. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah sejalan dengan apa yang diing-

inkan masyarakat. Seperti masalah klasik banjir dan kemacetan harus dievaluasi terbuka," ucapnya juga.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan Kemendagri menetapkan nilai APBD DKI 2015 sebesar Rp 69,286 triliun. Jumlah ini turun dibanding usulan Rapergub APBD 2015 DKI senilai Rp 72,9 triliun. Menurutnya ada beberapa program yang disesuaikan dan dikurangi anggarannya.

"Seperti program sosialisasi, pembelian tanah juga dikurangi ya. Misalnya kemarin diusulkan Rp 7 triliun untuk beli tanah, dikurangi Rp 1 triliun, jadi Rp 6 triliun," kata Saefullah. Namun, untuk anggaran untuk program penanggulangan banjir dan kemacetan tidak dikurangi. Pihaknya akan menyisir kembali APBD 2015 yang telah disahkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Dari penyisiran itu, DKI akan melakukan efisiensi, pemangkasan, serta pengalihan program. Sementara untuk alokasi belanja pegawai, DKI mengurangi sedikit anggaran gaji dan tunjangan. "Kalau kemarin, anggaran yang kami alokasikan ada Rp 19 triliun dari gaji sama tunjangan. Kemarin kami hitung lagi, sekitar Rp 18,5 triliun. Jadi ada pengurangan sekitar Rp 500 miliar. Pengurangan Rp 3 triliun dari APBD itu dapat kami sesuaikan kok programnya, enggak bingung," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu lagi.

Sedangkan, besaran APBD 2015 sebesar Rp 69,286 triliun itu didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk PMP dua BUMD DKI (PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta) sebesar Rp 5,63 triliun. (wok)